

Implikasi Hukuman Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia Sebuah Tinjauan Kritis

Soni Rohima Daulay¹, Tamaulina Br. Sembiring²

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

sonirohimadaulay@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,
Vol: 2, No: 1, Januari 2024
Halaman :284-297

Abstract

This research aims to conduct a critical review of the implications of criminal punishment on human rights in the context of the criminal justice system. Using a qualitative method and based on literature study data sources, this research approaches the problem by focusing on the balance between the effectiveness of criminal punishment in crime prevention and the protection of human rights is the main focus. How the punishment system can provide adequate sanctions without undermining the basic rights of individuals is the central question. A review of the methods, intensity and implementation of criminal punishment is key to understanding this dynamic. It is important to assess the extent to which human rights protection is achieved within the criminal punishment system. Measures and procedures in law enforcement must ensure that individual rights are respected and protected. Justice in the context of criminal punishment is essential, where every law enforcement action must be in line with universally recognized human rights principles. An in-depth analysis of the level of human rights protection in the criminal sentencing system. The review will cover key aspects such as the right to an effective defense, conditions of detention, and the implementation of alternative sanctions that are more in line with humanitarian principles. The role of oversight institutions and accountability mechanisms will also be evaluated. The results of this study are expected to provide critical insights into the relationship between criminal punishment and human rights, present findings that can support improvements in the criminal punishment system, and illustrate steps towards more effective protection of human rights.

Keywords:

*legal implications
criminal
HAM*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap implikasi hukuman pidana terhadap hak asasi manusia dalam konteks sistem peradilan pidana. Dengan menggunakan metode kualitatif dan berbasis pada sumber data studi pustaka, penelitian ini mendekati permasalahan dengan memfokuskan pada Keseimbangan antara efektivitas hukuman pidana dalam pencegahan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama. Bagaimana sistem hukuman dapat memberikan sanksi yang memadai tanpa merendahkan hak-hak dasar individu adalah pertanyaan sentral. Tinjauan metode, intensitas, dan implementasi hukuman pidana menjadi kunci untuk memahami dinamika ini. Penting untuk menilai sejauh mana perlindungan hak asasi manusia tercapai dalam sistem hukuman pidana. Langkah dan prosedur dalam penegakan hukum harus memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi. Keadilan dalam konteks hukuman pidana esensial, di mana setiap tindakan penegakan hukum harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Analisis mendalam terhadap tingkat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukuman pidana. Tinjauan akan mencakup aspek-aspek kunci seperti hak atas pembelaan yang efektif, kondisi penahanan, dan implementasi sanksi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Peran lembaga pengawas dan mekanisme akuntabilitas akan dievaluasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kritis terhadap hubungan antara hukuman pidana dan hak asasi manusia, menyajikan temuan yang dapat mendukung perbaikan dalam sistem hukuman pidana, dan menggambarkan langkah-langkah menuju perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.

Kata Kunci : implikasi hukum, pidana. HAM

PENDAHULUAN

Konteks hubungan antara hukuman pidana dan hak asasi manusia memperlihatkan adanya dinamika kompleks dalam sistem hukum suatu negara. Hukuman pidana, sebagai instrumen penegakan hukum, memegang peran vital dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (MBUSA, 2021). Seiring perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia yang semakin diakui secara universal, perluasan perlindungan hak-hak dasar individu menjadi fokus utama dalam berbagai perundang-undangan dan perjanjian internasional. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan bagaimana hukuman pidana dapat diterapkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Selaras dengan konsep hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi, bahkan ketika sedang menjalani hukuman, keseimbangan antara kebutuhan hukum untuk memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran dan hak asasi manusia perlu dicapai dengan cermat. Terdapat tantangan nyata dalam memastikan bahwa hukuman pidana tidak melanggar hak-hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan, perlakuan yang manusiawi, dan perlindungan dari diskriminasi.

Implementasi hukuman pidana memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum dan lembaga masyarakat dalam memastikan bahwa proses hukuman berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kesadaran akan potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem hukuman pidana menjadi penting agar upaya penegakan hukum tidak mengorbankan integritas dan martabat individu.

Tinjauan kritis terhadap implikasi hukuman pidana terhadap hak asasi manusia menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Pemahaman mendalam terkait konteks hubungan ini akan memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga hukuman pidana dapat dijalankan dengan efektif tanpa mengabaikan hak-hak individu yang dijamin oleh norma-norma hak asasi manusia (Wotulo, 2022).

Dalam menjalankan hukuman pidana, prinsip utama yang harus dipegang teguh adalah bahwa sanksi yang diberlakukan harus proporsional dan tidak bersifat merendahkan martabat manusia. Hukuman yang melibatkan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, perlu adanya evaluasi konstan terhadap sistem hukuman pidana guna memastikan bahwa metode dan pelaksanaan sanksi tidak hanya efektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, tetapi memperhatikan hak-hak dasar individu.

Konteks hubungan antara hukuman pidana dan hak asasi manusia mencakup isu-isu seperti overkriminalisasi dan ketidaksetaraan dalam pemberlakuan hukuman. Overkriminalisasi, yaitu pemakaian hukuman pidana untuk tindakan-tindakan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara-cara non-pidana, dapat mengakibatkan penyalahgunaan sistem hukuman dan pelanggaran hak asasi manusia, perlu diperhatikan bahwa pemberian hukuman yang tidak seimbang atau diskriminatif dapat merugikan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Dalam menganalisis konteks ini, sangat penting untuk mengevaluasi kebijakan dan praktik-praktik hukuman pidana yang ada, serta mengidentifikasi potensi perbaikan guna menghindari pelanggaran hak asasi manusia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam menyusun panduan dan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam merancang dan mengelola sistem hukuman pidana yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hubungan antara hukuman pidana dan hak asasi manusia secara kritis, diharapkan dapat tercipta landasan yang kuat untuk pengembangan kebijakan hukum yang mendukung penegakan hukuman yang efektif, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi dan dihormati.

Tinjauan kritis terhadap implikasi hukuman pidana merupakan aspek penting dalam pemahaman mendalam terhadap interaksi kompleks antara penegakan hukum dan hak asasi manusia. Keberadaan hukuman pidana dalam suatu sistem hukum bukan hanya sebagai instrumen pemulihan

ketertiban sosial, tetapi sebagai potensi sumber potensi pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu, urgensi tinjauan kritis terletak pada beberapa hal yang memegang peranan sentral.

Tinjauan kritis dapat membantu mengidentifikasi ketidakseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dengan menganalisis implementasi hukuman pidana dapat mengevaluasi sejauh mana sanksi-sanksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tinjauan ini memungkinkan untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan melibatkan semua pihak dalam menegakkan hukum dengan penuh integritas.

Tinjauan kritis memberikan ruang bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan merinci dan menganalisis kasus-kasus konkret serta tren-tren dalam pemberlakuan hukuman pidana dapat merumuskan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana.

Kemampuan untuk menciptakan kesadaran publik tentang tantangan dan dilema dalam menjalankan hukuman pidana tanpa merugikan hak-hak individu. Masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan hukum harus selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia, dan tinjauan kritis berperan sebagai alat untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara keadilan hukum dan hak asasi manusia (Hamdi dkk., 2023).

Implikasi hukuman pidana membantu membentuk pandangan yang lebih holistik terkait interaksi kompleks ini, yang pada gilirannya dapat memberikan landasan untuk perubahan positif dalam sistem hukum yang lebih responsif terhadap hak-hak dasar individu.

Di dalam ruang yang kompleks antara hukuman pidana dan hak asasi manusia, muncul pertanyaan yang mendalam tentang dampak dan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu. Bagaimana, sebenarnya, hukuman pidana dapat memengaruhi hak asasi manusia? Pertanyaan ini membuka jendela bagi telaah yang mendalam terkait konsekuensi dari pemberlakuan sanksi pidana terhadap kebebasan dan martabat individu.

Keseimbangan antara efektivitas hukuman pidana dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana sistem hukuman mampu memberikan sanksi yang memadai tanpa merendahkan atau melanggar hak-hak dasar individu? Tinjauan terhadap metode, intensitas, dan implementasi hukuman pidana menjadi penting untuk memahami dinamika ini.

Sejauh mana perlindungan hak asasi manusia tercapai dalam sistem hukuman pidana, langkah dan prosedur dalam penegakan hukum memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi, esensi dari keadilan dalam konteks hukuman pidana, di mana setiap tindakan penegakan hukum harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis secara mendalam bagaimana hukuman pidana dapat memengaruhi hak asasi manusia, sekaligus mengeksplorasi sejauh mana perlindungan hak asasi manusia telah tercapai dalam konteks sistem hukuman pidana. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang komprehensif terkait dengan interaksi kompleks antara hukuman pidana dan hak asasi manusia, dengan fokus pada implikasi dan tantangan yang mungkin timbul.

Penelitian ini bertujuan untuk membongkar lapisan-lapisan dampak hukuman pidana terhadap hak asasi manusia. Dengan mendalami konsep-konsep kunci seperti pemidanaan, pemenjaraan, dan sanksi lainnya, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan hukuman dapat memengaruhi hak-hak dasar individu. Pemahaman mendalam terkait mekanisme dan konteks praktik-praktik hukuman pidana akan memberikan landasan untuk merinci implikasi yang mungkin muncul.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hak asasi manusia telah terintegrasi dalam sistem hukuman pidana. Analisis akan difokuskan pada langkah-langkah konkret, prosedur, dan kebijakan yang telah diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap

tindakan penegakan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, penelitian ini memberikan gambaran mengenai keefektifan sistem dalam melindungi hak-hak dasar individu.

Dengan tujuan ini, penelitian ini berharap dapat memberikan sumbangan signifikan dalam mengidentifikasi area-area perbaikan yang mungkin diperlukan dalam sistem hukuman pidana, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap terlindungi dalam setiap tahap penegakan hukum.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan kritis (Rifa'i dkk., 2023). Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam terhadap implikasi hukuman pidana. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena, tetapi untuk menganalisis secara kritis dampak dan tantangan yang mungkin timbul dalam praktik hukuman pidana terhadap hak asasi manusia.

Studi pustaka menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Sumber data utama adalah literatur-literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan hukuman pidana dan yang relevan (Astawa dkk., 2023). Melalui studi pustaka, penelitian ini akan merinci konsep-konsep kunci terkait hukuman pidana dan hak asasi manusia, serta mengeksplorasi perkembangan teori dan pandangan ahli dalam bidang ini.

Analisis dokumen akan menjadi teknik utama dalam mengumpulkan data. Analisis ini mencakup review terhadap undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang berkaitan dengan hukuman pidana dan yang relevan (Tahir dkk., 2023), penelitian akan menelaah putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk memahami hukuman pidana diterapkan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini memberikan pemahaman lebih rinci terkait implementasi dan interpretasi hukuman pidana oleh lembaga peradilan.

Penelitian ini akan mengintegrasikan data-data membentuk analisis kritis terhadap implikasi hukuman pidana terhadap hak asasi manusia, metode penelitian ini memberikan landasan yang kokoh untuk menggambarkan dinamika kompleks dan tantangan dalam hubungan antara hukuman pidana dan hak asasi manusia, serta menyajikan hasil penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada pemahaman dan perbaikan sistem hukuman pidana yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Kerangka Teori
- 1. Konsep Hukuman Pidana

Kerangka teori konsep hukuman pidana menjadi pondasi kritis dalam pemahaman mengenai implementasi dan dampak hukuman terhadap individu. Hukuman pidana, sebagai instrumen penegakan hukum, memiliki dasar filosofis yang mendasari sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Teori retributif, salah satu konsep dasar dalam hukuman pidana, menekankan pemulihan keseimbangan keadilan melalui pemberian sanksi yang setimpal dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan (Saefullahnur, 2023). Konsep ini memandang hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan kriminal, dengan tujuan menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Teori prevensi memainkan peran penting dalam konsep hukuman pidana. Prevensi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum bertujuan untuk mencegah masyarakat dari tindakan kriminal dengan menunjukkan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan akibat perbuatan tersebut (Usman, 2011). Sementara itu, prevensi khusus lebih berfokus pada pelaku kejahatan, dengan memberikan hukuman sebagai upaya untuk mencegahnya melakukan tindakan kriminal lagi di masa mendatang.

Hukuman pidana dapat dilihat dari perspektif rehabilitatif, yang menempatkan fokus pada perbaikan perilaku pelaku kejahatan melalui berbagai program rehabilitasi. Konsep rehabilitatif menekankan pentingnya memberikan peluang kepada pelaku untuk memperbaiki diri, menghindari kembali ke jalur kriminal, dan berkontribusi positif pada masyarakat (Candra & Rifqi, 2021).

Kerangka teori konsep hukuman pidana menciptakan landasan yang komprehensif untuk memahami prinsip-prinsip filosofis dan tujuan di balik pemberian sanksi pidana. Pemahaman mendalam terhadap berbagai konsep ini menjadi penting dalam menganalisis implikasi hukuman pidana terhadap hak asasi manusia dan merinci bagaimana konsep-konsep tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan sistem hukuman.

Konsep hukuman pidana dapat dipandang melalui lensa teori utilitarianisme, yang menilai hukuman berdasarkan pada dampak sosialnya (Aviva, 2023). Dalam kerangka ini, tujuan utama hukuman adalah untuk mencapai kesejahteraan maksimal bagi masyarakat dengan menghindari tindakan kriminal. Sanksi pidana diukur oleh sejauh mana dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan, seperti pencegahan kejahatan dan pembentukan norma-norma sosial.

Keragaman konsep hukuman pidana, keberlanjutan debat mengenai efektivitas masing-masing teori menjadi krusial. Konsep hukuman yang ideal harus mencakup keseimbangan antara keadilan, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi, sambil tetap menghormati hak asasi manusia, perlu adanya pendekatan holistik dalam merangkai kerangka teori hukuman pidana yang menggabungkan prinsip-prinsip retributif, preventif, rehabilitatif, dan utilitarianisme (SALAMI, 2016).

Kerangka teori konsep hukuman pidana memberikan landasan untuk memahami dasar filosofis hukuman dan menganalisis bagaimana implementasinya dapat berdampak pada hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis, penelitian ini dapat melihat lebih jauh bagaimana konsep hukuman pidana yang dijalankan oleh sistem hukum dapat menciptakan ketegangan atau keselarasan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal.

2. Hak Asasi Manusia

Kerangka teori hak asasi manusia menjadi pilar esensial dalam memahami dan menilai perlindungan terhadap hak-hak individu dalam konteks hukuman pidana (Junaidi dkk., 2023). Hak asasi manusia mencerminkan prinsip-prinsip mendasar yang melekat pada setiap individu sebagai entitas manusia. Dalam konteks hukuman pidana, hak asasi manusia dilihat sebagai pegangan moral dan hukum yang harus dihormati serta dilindungi dalam setiap tahap penegakan hukum.

Konsep hak asasi manusia memiliki akar dalam dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan berbagai instrumen hukum internasional lainnya (LUBIS, 2020). Hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi menjadi landasan utama hak asasi manusia yang harus diakui oleh setiap negara, hak atas keadilan, privasi, dan kebebasan berpendapat menjadi bagian integral dari kerangka teori hak asasi manusia (Suntian, 2023).

Pendekatan universalitas dan tidak dapat dicabut dari hak asasi manusia menjadikannya relevan dalam setiap konteks hukum, termasuk dalam penegakan hukuman pidana. Hak asasi manusia menempatkan individu sebagai subyek yang berhak mendapatkan perlindungan dalam pengadilan, pemidanaan, dan pelaksanaan hukuman. Hak asasi manusia memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukuman pidana, serta memperlihatkan pentingnya menghindari sanksi yang bersifat melanggar hak-hak individu.

Kerangka teori hak asasi manusia menjadi panduan utama untuk menganalisis sejauh mana implementasi hukuman pidana dapat mempertahankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penggunaan kerangka teori ini membantu menjawab pertanyaan kritis terkait dampak hukuman pidana terhadap hak asasi manusia, sekaligus menyoroti aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa setiap sanksi hukuman tetap sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang fundamental.

3. Hubungan dan Dinamika Antara Keduanya

Kerangka teori mengenai hubungan dan dinamika antara konsep hukuman pidana dan hak asasi manusia memperlihatkan kompleksitas dalam penegakan hukum yang seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hukuman pidana, sebagai respon terhadap pelanggaran hukum, memerlukan evaluasi seksama terhadap dampaknya terhadap hak-hak individu yang dilibatkan. Dalam dinamika ini, konsep retributif menekankan pada keadilan dan pembalasan sebagai bentuk tanggapan terhadap tindakan kriminal, perlu dicermati agar hukuman yang dijatuhkan tidak melanggar hak asasi manusia dan tetap proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Konsep preventif dalam hukuman pidana menghadirkan dimensi pencegahan lebih lanjut, baik secara umum maupun khusus terhadap pelaku. Prinsip ini mengharuskan penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada masyarakat secara umum, tetapi memerlukan kewaspadaan agar tidak menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia terhadap individu tertentu, dinamika antara prevensi dan perlindungan hak asasi manusia menjadi titik kritis dalam implementasi hukuman pidana (SYAHRAENI, 2021).

Aspek rehabilitatif, sebagai salah satu konsep hukuman pidana, menambahkan lapisan kompleksitas pada hubungan ini. Rehabilitasi mencakup usaha pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Tantangan muncul dalam memastikan bahwa proses rehabilitasi tidak hanya bersifat efektif dalam mencegah kejahatan berulang tetapi memperhatikan hak-hak individu yang terlibat.

Kerangka teori ini mencerminkan pentingnya memahami interaksi dinamis antara konsep-konsep hukuman pidana dan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, analisis hubungan dan dinamika ini akan memberikan wawasan kritis terhadap implementasi hukuman pidana dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak-hak dasar individu yang melekat pada setiap manusia.

Dalam kerangka teori hubungan dan dinamika antara konsep hukuman pidana dan hak asasi manusia, penting untuk mengeksplorasi konsep utilitarianisme. Dalam perspektif utilitarian, hukuman pidana dinilai berdasarkan pada dampak sosialnya, dengan tujuan mencapai kesejahteraan maksimal bagi masyarakat. Pengukuran efektivitas hukuman terletak pada sejauh mana dapat mencegah tindakan kriminal, menjaga ketertiban sosial, dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, dalam mengadopsi pendekatan utilitarian, perlu diperhatikan bahwa dampak tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip moral yang mendasari hak-hak individu.

Perluasan dan perbandingan antara berbagai konsep hukuman pidana. Sejauh mana penerapan hukuman pidana mempertahankan keseimbangan antara retribusi, pencegahan, dan rehabilitasi, sambil tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia, menjadi fokus analisis yang mendalam.

Dalam mendiskusikan dinamika antara hukuman pidana dan hak asasi manusia, perlu mempertimbangkan konsep sanksi alternatif dan pembaruan dalam sistem hukuman. Upaya mencari bentuk sanksi yang lebih bermartabat dan manusiawi menjadi relevan dalam memastikan bahwa hukuman pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi sebagai instrumen perbaikan dan reintegrasi sosial (Puspital dkk., 2023).

Kerangka teori ini memberikan landasan yang kokoh untuk menggambarkan relasi antara konsep-konsep hukuman pidana dan hak asasi manusia. Melalui analisis hubungan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif terhadap bagaimana implementasi hukuman pidana dapat berdampak pada hak asasi manusia dan merinci aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan keadilan, efektivitas, dan perlindungan hak asasi manusia yang optimal.

B. Implikasi Hukuman Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia

1. Analisis Kritis atas Konsep Hukuman Pidana

Dalam melakukan analisis kritis terhadap konsep hukuman pidana, sangat penting untuk mempertimbangkan implikasi hukuman pidana terhadap hak asasi manusia. Konsep hukuman pidana yang didasarkan pada prinsip retribusi, sebagai contoh, dapat menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas dan perlakuan yang adil terhadap individu yang terlibat dalam sistem peradilan. Penerapan sanksi pidana yang berlebihan atau tidak sesuai dengan tingkat pelanggaran dapat melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas perlakuan yang manusiawi dan hak atas kebebasan (Laia dkk., 2023).

Konsep preventif dalam hukuman pidana, baik dalam bentuk prevensi umum maupun khusus, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak merugikan hak-hak dasar individu. Upaya pencegahan kejahatan sering kali melibatkan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, tetapi penelitian ini perlu menggali apakah tindakan tersebut mungkin berpotensi melanggar privasi atau hak kebebasan individu.

Kerangka teori rehabilitatif di satu sisi, konsep ini menawarkan peluang untuk memberikan perhatian kepada perbaikan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, di sisi lain, perlu dipertimbangkan sejauh mana upaya rehabilitasi dapat dijalankan tanpa melanggar hak asasi manusia, terutama hak-hak terkait privasi, pengobatan, dan kebebasan pribadi (Aviva, 2023).

Implikasi konsep hukuman pidana terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti minoritas atau kelompok rentan. Adanya diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam pelaksanaan hukuman pidana dapat melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlakuan setara dan tanpa diskriminasi.

Analisis kritis terhadap konsep hukuman pidana, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara jelas bagaimana setiap konsep berkontribusi pada implikasi terhadap hak asasi manusia. Pemahaman mendalam ini akan memberikan dasar yang solid untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan praktik-praktik hukuman pidana yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

2. Pemahaman Konsep Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukuman Pidana

Pemahaman konsep hak asasi manusia dalam konteks hukuman pidana menjadi hal yang mendasar untuk menilai implikasi hukuman pidana terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia, sebagai seperangkat hak yang melekat pada setiap individu, harus menjadi landasan utama dalam perumusan, penerapan, dan evaluasi hukuman pidana. Konsep ini menempatkan individu sebagai pemegang hak yang memiliki martabat dan kebebasan yang harus dihormati, terlepas dari status hukum atau kondisi apapun.

Hukuman pidana harus memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum tidak melanggar hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal. Hak atas kebebasan, keadilan, dan perlakuan yang manusiawi menjadi prinsip-prinsip kritis yang harus dijaga dalam pelaksanaan hukuman pidana. Konsep hak asasi manusia menuntut bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dan dengan mempertimbangkan hak-hak privasi (Husada, 2020).

Implikasi terhadap hak asasi manusia muncul dalam proses penyelidikan, penangkapan, dan penahanan. Konsep keadilan dalam hak asasi manusia menekankan pentingnya proses yang adil dan transparan. Hak individu untuk memiliki akses terhadap pengacara, pemberitahuan atas alasan penahanan, dan perlindungan terhadap penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi menjadi unsur-unsur kritis dalam konteks hukuman pidana.

Dalam mengeksplorasi implikasi hukuman pidana terhadap hak asasi manusia, aspek sentral yang perlu dipertimbangkan adalah hak atas kebebasan dan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Hukuman pidana sering melibatkan pembatasan kebebasan fisik individu melalui penahanan atau pidanaan, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia menetapkan bahwa pidanaan harus memenuhi standar kebebasan yang diakui. Kondisi penahanan harus sesuai

dengan norma-norma hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak menjadi korban penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat.

Konsep hak asasi manusia memberikan keadilan dalam sistem peradilan pidana sangat ditekankan. Hak atas keadilan yang adil termasuk hak atas pembelaan yang efektif, kehadiran di hadapan pengadilan yang independen, dan pemberitahuan atas dakwaan. Prinsip ini menuntut agar setiap individu memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan perlakuan yang adil selama proses peradilan pidana (Firdaus, 2021).

Implikasi terhadap hak asasi manusia dalam konteks sanksi pascapenjatuhan hukuman, termasuk hak atas privasi dan hak untuk mengajukan banding. Dalam menjalani hukuman, individu tetap memiliki hak untuk mempertahankan martabatnya dan mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Dalam konteks ini, perlindungan hak asasi manusia mengharuskan adanya mekanisme banding yang efektif dan transparan.

Memahami konsep hak asasi manusia dalam konteks hukuman pidana, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi ketidakselarasan antara praktik-praktik hukuman pidana dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Diharapkan analisis ini dapat memberikan kontribusi pada perbaikan sistem hukuman pidana yang lebih mengutamakan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia.

C. Analisis Kasus Kontemporer

1. Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Analisis terhadap kasus-kasus kontemporer menjadi langkah kritis dalam memahami tantangan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukuman pidana. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan, tindakan penyiksaan, atau penggunaan kekerasan yang berlebihan selama penangkapan atau penahanan menunjukkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman pidana dan dapat melanggar hak asasi manusia. Penanganan kasus semacam ini menyoroti perlunya mekanisme kontrol internal dan eksternal yang lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di tingkat penegakan hukum.

Tantangan lain muncul dalam sistem peradilan pidana, terutama berkaitan dengan akses terhadap pembelaan yang layak. Kasus-kasus di mana individu tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum atau pengacara dapat membawa konsekuensi serius terhadap keadilan dan hak asasi manusia (KAPOJOS, t.t.). Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan dan menunjukkan perlunya reformasi untuk memastikan setiap individu memiliki hak yang setara dalam mempertahankan diri di hadapan hukum.

Kasus-kasus kontemporer menghadirkan tantangan terkait dengan hukuman yang bersifat diskriminatif. Ketidaksetaraan dalam penerapan hukuman terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti minoritas atau kelompok rentan, menjadi isu serius yang dapat melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemahaman lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan diskriminasi dalam hukuman pidana diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang sesuai.

Mengidentifikasi pola-pola dan tren-tren yang muncul dalam tantangan perlindungan hak asasi manusia dalam hukuman pidana. Analisis mendalam ini akan memberikan wawasan yang komprehensif dan memberikan dasar untuk merancang solusi dan perbaikan dalam sistem hukuman pidana guna mengatasi tantangan-tantangan hak asasi manusia yang terus muncul.

2. Hambatan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Analisis terhadap kasus-kasus kontemporer menggambarkan adanya hambatan yang signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukuman pidana. Salah satu hambatan utama adalah terkait dengan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan penegakan hukum. Kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan, seperti tindakan penyiksaan atau penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, menciptakan tantangan serius terhadap perlindungan hak asasi manusia. Sistem penegakan hukum yang tidak akuntabel dapat merugikan hak-hak individu dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum (SALAMI, 2016).

Hambatan muncul dalam bentuk ketidaksetaraan akses terhadap sistem peradilan pidana. Kasus-kasus di mana individu tidak dapat mengakses bantuan hukum atau pembelaan yang memadai menyoroti hambatan serius dalam mencapai keadilan yang seimbang. Ketidaksetaraan ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, atau budaya, dan menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas pembelaan yang adil dan kompeten.

Diskriminasi dalam penerapan hukuman pidana menjadi hambatan yang harus diatasi. Kasus-kasus di mana kelompok-kelompok tertentu, seperti minoritas atau kelompok rentan, mengalami perlakuan diskriminatif dalam hukuman menciptakan tantangan serius terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (Pertwi, 2023). Hambatan ini mengakibatkan kesenjangan dalam perlindungan hak asasi manusia dan menunjukkan perlunya reformasi untuk memastikan bahwa hukuman pidana diterapkan secara adil dan setara bagi semua individu.

Hambatan-hambatan dapat memberikan pandangan mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak asasi manusia dalam hukuman pidana. Langkah-langkah perbaikan dan reformasi diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan bahwa sistem hukuman pidana beroperasi dengan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.

D. Strategi Peningkatan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukuman Pidana

Peningkatan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukuman pidana memerlukan adopsi strategi-strategi yang holistik dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang telah diidentifikasi melalui analisis kasus-kasus kontemporer termasuk:

1. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Institusi Hukum

Penguatan pengawasan dan akuntabilitas institusi hukum menjadi langkah krusial dalam meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukuman pidana. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu. Internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pelatihan dan etika aparat penegak hukum menjadi pondasi yang penting dalam menciptakan budaya akuntabilitas.

Salah satu pendekatan untuk penguatan ini adalah melalui peningkatan keterbukaan dan transparansi proses penegakan hukum. Informasi terkait operasi penegak hukum, tindakan penyidikan, dan keputusan hukuman harus diakses dengan mudah oleh publik. Hal ini tidak hanya memberikan kontrol eksternal, tetapi dapat menjadi pendorong untuk peningkatan kualitas dan integritas lembaga penegak hukum.

Independensi lembaga pengawasan seperti ombudsman hukum atau komisi hak asasi manusia tidak dapat diabaikan. Lembaga-lembaga ini dapat menjadi mekanisme pengawasan eksternal yang efektif, menerima pengaduan masyarakat, menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem.

Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia dan etika profesional perlu diperkuat. Ini bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman terhadap hak-hak individu, tetapi untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan standar kemanusiaan tertinggi.

2. Peningkatan Akses Terhadap Pembelaan Hukum

Peningkatan akses terhadap pembelaan hukum merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan dan melindungi hak asasi manusia dalam sistem hukuman pidana. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas bantuan hukum dapat dimulai dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ekonomi, sosial, dan budaya yang menghalangi individu untuk mendapatkan pembelaan yang layak (Syahputra dkk., 2022).

Salah satu strategi efektif adalah memperkuat sistem bantuan hukum yang mencakup penyediaan jasa bantuan hukum gratis atau subsidi untuk yang tidak mampu, pendekatan inovatif seperti klinik hukum masyarakat dapat membantu memberikan akses terhadap informasi hukum dan bantuan hukum kepada yang membutuhkan, terutama yang berasal dari kelompok rentan atau kurang mampu.

Pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak-hak hukum menjadi fokus utama. Kampanye pendidikan hukum, seminar, dan pelatihan yang menyoroti kelompok-kelompok yang rentan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki akses terhadap pembelaan hukum dan bagaimana memanfaatkannya.

Advokasi dan dukungan untuk menciptakan lingkungan hukum yang ramah bagi individu yang memerlukan bantuan hukum tidak boleh diabaikan. Reformasi kebijakan untuk memperbaiki sistem bantuan hukum dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa pandang status, dapat dengan mudah mengakses pembelaan hukum yang layak menjadi bagian integral dari peningkatan akses terhadap keadilan.

Penguatan akses terhadap pembelaan hukum bukan hanya tentang memberikan bantuan hukum yang memadai tetapi membentuk kesadaran masyarakat akan hak-hak, memberikan alat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan pidana, dan memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi (Candra & Rifqi, 2021).

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Hukum

Pemberdayaan masyarakat dan pendidikan hukum memiliki peran sentral dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia dan memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk melibatkan diri secara efektif dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan masyarakat yang lebih berpengetahuan tentang hak-hak, tetapi memungkinkan untuk berkontribusi dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukuman pidana.

Salah satu cara pemberdayaan masyarakat adalah melalui kampanye pendidikan hukum yang menyoroti berbagai lapisan masyarakat. Seminar, lokakarya, dan kegiatan edukatif lainnya dapat memberikan pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia, proses hukum, serta kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam mendukung keadilan. Pendidikan hukum ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pengetahuan dan memberikan alat kepada individu untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan.

Pendidikan hukum di sekolah-sekolah tidak dapat diabaikan. Integrasi materi hak asasi manusia dan pemahaman sistem peradilan pidana dalam kurikulum sekolah dapat membentuk pandangan masyarakat yang berbasis pengetahuan dan etika hukum, generasi muda akan tumbuh dengan pemahaman yang kuat akan hak-hak dan kesadaran akan pentingnya keadilan (Alpadira dkk., 2023).

Inisiatif pemberdayaan masyarakat dapat melibatkan pembentukan kelompok advokasi atau organisasi nirlaba yang berfokus pada hak asasi manusia. Organisasi semacam ini dapat menyediakan sumber daya, bantuan hukum, dan dukungan bagi individu yang memerlukan, sekaligus memobilisasi masyarakat untuk bersama-sama menuntut keadilan dan mengawasi pelaksanaan hukuman pidana.

4. Reformasi Hukuman dan Sanksi Alternatif

Reformasi hukuman dan sanksi alternatif menjadi langkah krusial dalam memperbaiki sistem hukuman pidana dan memastikan bahwa hukuman yang diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendekatan ini mengacu pada perubahan substansial dalam jenis dan penerapan hukuman, menuju sistem yang lebih manusiawi, mendidik, dan mampu merintis jalan bagi reintegrasi sosial.

Salah satu aspek reformasi yang signifikan adalah pemikiran ulang terhadap hukuman penjara sebagai satu-satunya bentuk sanksi. Sanksi penjara cenderung menyebabkan overpopulasi penjara, risiko penyalahgunaan kekuasaan, dan masalah keamanan yang serius (Royanti, 2020). Melalui reformasi, pemerintah dapat mempertimbangkan alternatif sanksi, seperti hukuman komunitas, pengawasan elektronik, atau program rehabilitasi, yang dapat lebih efektif dalam memberikan pembelajaran dan mendukung reintegrasi sosial.

Pentingnya rehabilitasi dalam konteks reformasi tidak boleh diabaikan. Program rehabilitasi yang terfokus pada perbaikan perilaku dan keahlian dapat membantu melibatkan individu yang terlibat dalam kegiatan konstruktif, mengurangi tingkat kriminalitas, dan mempersiapkan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Sanksi alternatif harus memperhitungkan faktor individual dan konteks kejahatan. Pendekatan yang berbasis risiko dan kebutuhan memastikan bahwa sanksi yang diterapkan sebanding dengan tingkat kejahatan, sambil tetap memperhatikan kebutuhan rehabilitasi individu.

5. Evaluasi dan Reformasi Kebijakan Hukum

Evaluasi dan reformasi kebijakan hukum menjadi langkah penting dalam perbaikan sistem peradilan pidana untuk lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Evaluasi kebijakan yang cermat memberikan landasan untuk mengidentifikasi kelemahan dan ketidaksesuaian dengan standar hak asasi manusia, sementara reformasi bertujuan mengubah struktur dan prosedur agar lebih adil, kemanusiaan, dan efektif (Sholikhah, 2024).

Evaluasi kebijakan harus melibatkan analisis mendalam terhadap hukum yang ada, prosedur peradilan, dan implementasi kebijakan hukuman. Penelitian ini dapat mencakup pemetaan ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dan standar hak asasi manusia, termasuk identifikasi kasus-kasus di mana pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi.

Reformasi kebijakan hukum harus diarahkan untuk mengatasi temuan evaluasi dan merancang kebijakan yang lebih sejalan dengan hak asasi manusia. Ini dapat mencakup penyederhanaan dan klarifikasi hukum, peningkatan akses terhadap pembelaan hukum, serta peninjauan kembali hukuman yang diterapkan. Reformasi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti diversifikasi sanksi dan peningkatan rehabilitasi untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada keadilan.

Partisipasi masyarakat dan lembaga hak asasi manusia dalam proses evaluasi dan reformasi tidak boleh diabaikan. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan advokat hak asasi manusia, dapat memastikan bahwa perspektif yang beragam dipertimbangkan dan hasilnya mencerminkan nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Hukuman pidana dapat memiliki dampak signifikan terhadap hak asasi manusia, terutama karena melibatkan pembatasan kebebasan individu. Penahanan dan pemidanaan, sebagai bentuk hukuman pidana, dapat menimbulkan tantangan terhadap hak atas kebebasan dan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Pemberian hukuman yang tidak sesuai atau melanggar standar hak asasi manusia dapat membahayakan martabat individu, mengancam hak privasi, dan merampas hak untuk mendapat perlakuan yang adil selama proses peradilan, penting untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan hukuman pidana dapat memengaruhi hak asasi manusia individu dan menjaga keseimbangan antara tujuan hukuman dan perlindungan hak asasi manusia.

Evaluasi tingkat perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukuman pidana memerlukan tinjauan mendalam terhadap implementasi norma-norma hak asasi manusia dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Aspek-aspek seperti hak atas pembelaan yang efektif, kondisi penahanan yang sesuai dengan standar kemanusiaan, serta perlakuan manusiawi dalam pelaksanaan hukuman perlu dievaluasi. Peran lembaga-lembaga pengawas eksternal, seperti ombudsman atau komisi hak asasi manusia, perlu diperhitungkan untuk mengukur sejauh mana mekanisme kontrol dan akuntabilitas telah diterapkan. Tinjauan menyeluruh ini akan memberikan gambaran sejauh mana perlindungan hak asasi manusia telah diterapkan dan sekaligus menjadi dasar untuk perbaikan dan reformasi dalam sistem hukuman pidana.

REFERENCES

- Alpadira, R. O., Sukmareni, S., & ... (2023). Studi Komparatif Terhadap Hukuman Mati Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Innovative: Journal Of ...* [Http://Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/3079](http://Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/3079)
- Astawa, I. G. P., Sh, M., Widjajanto, S. A., & ... (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. Researchgate.Net. https://Www.Researchgate.Net/Profile/Rusdin-Tahir/Publication/376513978_Metodologi_Penelitian_Bidang_Hukum/Links/657b1e5c6610947889cc46d1/Metodologi-Penelitian-Bidang-Hukum.Pdf
- Aviva, F. N. (2023). Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 111–123.
- Candra, M., & Rifqi, M. J. (2021). Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Penologi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 436–462.
- Firdaus, F. S. (2021). Penyelidikan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 82/Pid *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum] ...* [Http://Jurnalmahasiswa.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Jimhum/Article/View/131](http://Jurnalmahasiswa.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Jimhum/Article/View/131)
- Hamdi, S., Fadrijani, L., Fadlan, F., & ... (2023). Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Alternatif Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian Di *Jerumi: Journal Of ...* [Http://Www.Rayyanjournal.Com/Index.Php/Jerumi/Article/View/1393](http://Www.Rayyanjournal.Com/Index.Php/Jerumi/Article/View/1393)
- Husada, I. F. (2020). *Penjatuhan Hukuman Pidana Berdasarkan Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kealpaan (Analisis Putusan Nomor 241/Pid. B/2019/Pn. Mjl)*.
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., Rohman, M. M., Sholihah, H., Rafi'ie, M., & Dhahri, I. (2023). *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Ultseaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa12&Dq=Kerangka+Teori+Hak+Asasi+Manusia+Menjadi+Pilar+Esensial+Dalam+Memahami+Dan+Menilai+Perlindungan+Terhadap+Hak+Hak+Individu+Dalam+Konteks+Hukuman+Pidan&Ots=Guue1k4elc&Sig=Dsdz7kg6kju0tssauedj5qleobi>

- Kapojos, F. (T.T.). Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Repository.Unhas.Ac.Id*. [Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/11598/](http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/11598/)
- Laia, S. A., Mh, C., Cha, C., & Sh, M. (2023). *Kesengsaraan Menanti Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Pidana Mati*. Books.Google.Com. https://Books.Google.Com/Books?Hl=En&Lr=\&Id=7n-1eaaaqbaj\&Oi=Fnd\&Pg=Pp1\&Dq=Hukuman+Pidana+Hak+Asasi+Manusia+Tinjauan+Kritis\&Ots=Nxvbmqiyp\&Sig=7_Kemrgijeobrlioqzeyhg3c5nu
- Lubis, P. M. L. (2020). *Implementasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) Menurut Undang-Undang Pemasarakatan Dalam Kerangka Perlindungan Narapidana* [Phd Thesis, Universitas Tadulako]. <https://Repository.Untad.Ac.Id/5399/>
- Mbusa, K. (2021). *Abolisi Legalitas Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Peradilan Pidana Di Indonesia: Tinjauan Etis Moral Tentang Nilai Hidup Dalam Terang Ensiklik Evangelium* *Repository.Iftkledalero.Ac.Id*. [Http://Repository.Iftkledalero.Ac.Id/Id/Eprint/989](http://Repository.Iftkledalero.Ac.Id/Id/Eprint/989)
- Pertiwi, I. C. (2023). *Reformulasi Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999* *Digilib.Uinkhas.Ac.Id*. [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/23644/1/Intan%20cahaya%20pertiwi-Watermark.Pdf](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/23644/1/Intan%20cahaya%20pertiwi-Watermark.Pdf)
- Puspital, C. I., Aprilia, R., & Dana, L. (2023). Implementasi Hukuman Kebiri Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Wilayah Pengadilan Negeri Pangkalpinang). *Innovative: Journal Of Social* [Http://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/5297](http://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative/Article/View/5297)
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., & ... (2023). Metodologi Penelitian Hukum. Dalam *Banten: Sada Kurnia* *Researchgate.Net*. https://Www.Researchgate.Net/Profile/Sada-Pustaka/Publication/372551174_Metodologi_Penelitian_Hukum/Links/64be34e4b9ed6874a540fd29/Metodologi-Penelitian-Hukum.Pdf
- Royanti, D. (2020). *Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*. *Repository.Ar-Raniry.Ac.Id*. <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/14753/>
- Saefullahnur, S. (2023). *Efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur (Analisis Undang-Undang No. 17* *Search.Proquest.Com*. <https://Search.Proquest.Com/Openview/Adcd512f7b520f648a757fc67d4fca4d/1?Pq-Origsite=Gscholar\&Cbl=2026366\&Diss=Y>
- Salami, N. (2016). *Problematika Hukum Rencana Pembuatan Lapas Buaya Untuk Terpidana Mati Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan* [Phd Thesis, Fakultas Hukum Unpas]. [Http://Repository.Unpas.Ac.Id/6476/](http://Repository.Unpas.Ac.Id/6476/)
- Sholikhah, A. W. N. (2024). Tinjauan Terhadap Relevansi Hukuman Pidana Dalam Sistem Peradilan Modern. *Jurnal Sains Student Research*. <https://Ejurnal.Kampusakademik.Co.Id/Index.Php/Jssr/Article/View/784>
- Suntian, I. A. P. (2023). Analisis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham) Terhadap Kelompok Minoritas Transgender Di Kota Tasikmalaya. *Epistemik: Indonesian Journal Of Social And Political Science*, 4(2), 53-65.
- Syahputra, G., Purba, N., & ... (2022). Relevansi Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Negara Berstatus Darurat Covid-19 Dalam Perspektif Kitab Undang *Jurnal Ilmiah* [Http://Ejournal.Steitholabulilmi.Ac.Id/Index.Php/Metadata/Article/View/125](http://Ejournal.Steitholabulilmi.Ac.Id/Index.Php/Metadata/Article/View/125)
- Syahaeni, S. (2021). *Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Darkoba Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. *Repository.Iainpalopo.Ac.Id*. [Http://Repository.Iainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/3864/1/Skripsi%20syahaeni%20%28repaired%29.Pdf](http://Repository.Iainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/3864/1/Skripsi%20syahaeni%20%28repaired%29.Pdf)
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., & ... (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Books.Google.Com. <https://Books.Google.Com/Books?Hl=En&Lr=\&Id=E4jheaaaqbaj\&Oi=Fnd\&Pg=Pa118\&Dq=Metodologi+Penelitian+Hukum\&Ots=Nta2ffzhit\&Sig=Swqtagjqehssvdowr4y55f8ectq>
- Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43258.

Wotulo, M. J. (2022). Analisis Yuridis Atas Hukuman Mati Terhadap Koruptor Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*.
<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/38511>